

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Studi hubungan internasional telah mengalami transformasi, dimulai dari studi mengenai tentang hubungan-hubungan antar negara yang hanya terbatas pada keamanan dan perang. Saat ini telah berubah menjadi lebih kompleks ketika aktor-aktor di dalam politik internasional bertambah dan pergeseran dari bentuk/pola interaksi hubungan antar negara. Saat ini aktor-aktor dalam hubungan internasional tak hanya negara, tetapi telah merambah ke organisasi internasional, perusahaan multinasional bahkan individu seperti terorisme yang terkait ke dalam sistem internasional (Johari JC, 1985, hlm 9). Isu pergeseran bentuk/pola interaksi hubungan internasional saat ini lebih megarah ke ekonomistik, karena ekonomi juga memainkan peran penting dalam percaturan politik internasional. Isu ekonomi juga mempunyai sifat yang kompleks dalam pengertian bahwa ekonomi memiliki hubungan yang erat dan pengaruh yang kuat dalam bidang politik, baik yang berskala nasional maupun internasional (Yuniarti, 2013, hlm.1).

Pasca Perang Dunia II merupakan salah satu peristiwa yang memunculkan isu ekonomi ke dalam studi hubungan internasional. Negara-negara Eropa Barat yang terkena cukup parah akibat perang dan mengalami keterpurukan ekonomi sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan kondisi tersebut Amerika Serikat berinisiatif mengambil perannya untuk membentuk institusi atau lembaga yang berfokus pada perekonomian dunia. Sistem yang biasa dikenal dengan sebutan “*Bretton Woods*” diambil dari nama kota kecil di Amerika Serikat merupakan tempat persetujuan *Bretton Woods* itu dibuat pada tahun 1944. Lebih dari 700 perwakilan 45 negara menghadiri konferensi tersebut, dan menghasilkan sistem *Bretton Woods* yang memiliki dua agenda utama, pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan kedua yaitu menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya

perang dunia (Gilpin, 1987, hlm. 129). Pembentukan tiga badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global hasil dari konferensi tersebut, yaitu *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang *World Bank*), dan *General Agreements on Tariffs and Trade/GATT* (sekarang *World Trade Organization/WTO*) (Stern, 1944, hlm. 165). Penelitian ini lebih terfokus pada IMF dan *World Bank* yang lebih memiliki peran dominan dalam pembentukan sistem moneter modern dan merekonstruksi perekonomian dunia khususnya di Eropa Barat akibat dampak perang. Kedua lembaga tersebut kini telah dijadikan sebagai institusi pembangunan ekonomi dunia untuk membantu perekonomian di negara dunia ketiga dalam bentuk pinjaman dan pengaturan kondisi kebijakan.

Secara umum IMF bertujuan untuk menjamin stabilitas moneter internasional dengan menjalin kerjasama antar negara didalam lembaga tersebut dan menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami deficit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan cara menyesuaikan tingginya kurs devisa. Sedangkan, *World Bank* untuk membantu negara-negara berkembang dalam menyusun rencana untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warganya. Bila berbagai sarana publik telah dibangun, maka diharapkan kemiskinan dapat tereliminasi. Sumber dana (modal) IMF dan *World Bank* didapatkan dari kontribusi negara-negara anggota berdasarkan GDP yang dimilikinya.

IMF dan *World Bank* telah memainkan perannya dalam mengatur perekonomian global. Lembaga-lembaga ini secara resmi telah memberikan kontribusinya ke beberapa negara, tetapi banyak teoritis hubungan internasional berpendapat bahwa hubungan lembaga keuangan tersebut telah di dominasi oleh Amerika Serikat yang merupakan tahap awal pada proses terjadinya hegemoni (Chorev dan Babb, 2009, hlm. 3). Hegemoni dalam arti disini adalah pengaruh Amerika Serikat terhadap perekonomian global khususnya di negara-negara berkembang melalui lembaga keuangan internasional (IMF dan *World Bank*).

Dominasi Amerika Serikat dapat dilihat dari pengambilan keputusan di kedua lembaga tersebut yang lebih sering menggunakan cara *voting* atau pengambilan suara terbanyak dari hasil pemilihan. Amerika Serikat memiliki sekitar 17% hak suara sedangkan untuk dapat meng-sahkan suatu persetujuan keputusan diperlukan 85%. Dengan demikian maka praktis tidak ada satu keputusan yang bisa diambil oleh IMF tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat (tanpa persetujuan Amerika Serikat hanya mencapai 83%). Hal ini lah yang sering disebut dengan kekuasaan tunggal atau hak veto. Tak hanya itu, didalam struktur pemerintahannya, jabatan presiden *World Bank* selalu dimonopoli oleh warga negara Amerika Serikat dan *Managing Director* IMF juga selalu berasal dari orang-orang Eropa Barat sebagai sekutu terdekatnya. Hal tersebut tidak mencerminkan sebuah lembaga yang menganut sistem demokrasi dan transparansi di dalam pemilihannya.

Dengan kondisi tersebut Amerika Serikat mampu mengintervensi negara-negara lain untuk menyelaraskan kebijakan negara tersebut sesuai dengan kepentingannya. Sebagai contoh pada terjadinya krisis keuangan di Asia, negara-negara yang mengalami krisis membutuhkan dana segar. Kemudian IMF datang membawa dana segar tersebut dengan memberikan syarat-syarat (*conditionalities*) yang wajib dijalankan. Sejak itu lembaga tersebut menganjurkan kebijakan yang sama kepada negara-negara berkembang. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam *Structural Adjustments Program* (SAPs), keduanya berkomitmen dengan prinsip-prinsip *Washington Consensus*. Padahal SAPs tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan justru tak jarang membawa permasalahan baru. Kemudian Amerika Serikat memainkan peran pentingnya sebagai pihak yang “mengemudikan” kebijakan-kebijakan kedua lembaga tersebut (Budiman, 2010). Melalui SAPs yang berdararkan prinsip-prinsip *Washington Consensus* tersebut hegemoni Amerika Serikat semakin tersebar luas di dunia dan sering juga kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang sedang membutuhkan pinjaman. Misalnya kegagalan paket kebijakan *Washington Consensus* yang mengakibatkan ketimpangan yang terjadi di beberapa daerah salah satunya ialah di Amerika Latin dimana kesenjangan antara kaya dan miskin

terus bertambah. Maka sejak periode 1980 sampai 2010 pertumbuhan global mengalami perlambatan (Dossani, 2007).

Hal tersebut jelas mempengaruhi hasil dari keputusan yang di buat oleh IMF maupun *World Bank* misalnya jumlah besaran pinjaman bahkan dalam persetujuan pinjamannya dan sangat sering penetapan regulasi kepada setiap peminjam dana mengharuskan menerapkan nilai-nilai neoliberalisme ala Amerika Serikat yang tercantum dalam *Washington Consensus* seperti mencabut subsidi, meningkatkan pajak, liberalisasi pasar, dan meningkatkan suku bunga, sehingga terjadi ketergantungan yang berkelanjutan kepada kedua lembaga tersebut maupun Amerika Serikat khususnya. Neoliberalisme telah mendominasi kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan memiliki pendukung yang kuat di Eropa Barat dan Jepang. Amerika Serikat telah berhasil “mendikte” kebijakan neoliberal di negara-negara berkembang, salah satunya melalui IMF dan *World Bank*. Dengan demikian bahwa keberadaan lembaga keuangan internasional ini menjadi penting untuk melegitimasi hegemoni Amerika Serikat dan memang bertujuan untuk melembagakan proses ekspansi dan hegemoni ekonomi Amerika Serikat ke seluruh penjuru dunia bersama negara-negara industri kaya lainnya dengan cara mensamarkan kepentingan nasionalnya menjadi kepentingan umum di bawah kebijakan yang bersifat universal, IMF dan *World Bank* memainkan perannya dengan baik.

Sistem unipolaritas di lembaga keuangan internasional memang telah lama dibangun oleh Amerika Serikat terhitung sejak pasca perang dunia kedua sehingga sangat terlihat jelas peran dominasi Amerika Serikat di dunia internasional kondisi tersebut ditopang dua pilar yaitu yang berbasis ideologis (*soft power*) dan kerangka kerja dari lembaga-lembaga internasional yang dibangun oleh Amerika Serikat (Layne, 2012, hlm. 2). Kondisi tersebut bukan berarti tidak ada kontradiksi didalamnya yang mengakibatkan penurunannya. Ada beberapa factor yang dianggap penyebab penurunannya baik dari internal maupun eksternal, factor internal dapat dilihat ketika Amerika Serikat mengalami krisis finansial pada tahun 2007 sedangkan factor eksternal munculnya kekuatan besar baru di ekonomi politik global.

Amerika Serikat memiliki peran dominan dalam ekonomi global pasca perang dunia II dan di lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, beberapa negara seperti Brazil, Rusia, China, India dan Afrika Selatan yang kemudian membentuk blok ekonomi yang disebut dengan BRICS telah memberikan tantangan dominasi Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak krisis keuangan di Amerika Serikat yang disebabkan oleh *bubble economy* di sektor properti dan kegagalan pembayaran (*default*) pasar produk kredit perumahan dan pasar *Subprime Mortgage* yang menjadikan sebuah momentum untuk penurunan hegemoni Amerika Serikat (Toruan, 2010, hlm. 44).

Selama beberapa tahun terakhir ini, perhatian telah diberikan kepada prospek pertumbuhan ekonomi Brazil, Rusia, India dan China yang disingkat menjadi BRIC. Akronim BRIC diperkenalkan oleh Jim O'Neill dari *Goldman Sachs*, sebuah perusahaan perbankan dan investasi global, pada tahun 2001 di dalam artikelnya yang berjudul "*The World Needs Better Economic BRICs*". Pertemuan tingkat tinggi BRIC pertama kali pada tanggal 16 juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia yang diketuai oleh Dmitry Medvedev sebagai tuan rumahnya. Pertemuan perdana ini membahas antara lain perbaikan situasi perekonomian global, reformasi institusi-institusi finansial, dan bagaimana menggeser sistem internasional unipolaritas yang dipimpin oleh Amerika Serikat menjadi multipolaritas dimana negara-negara berkembang dapat berperan aktif, (Mustaqim, 2013, hlm.1) karena keputusan tentang arsitektur keuangan baru dan pelaksanaan kekuasaan global tidak bisa lagi dibuat tanpa negara-negara berkembang, terutama China. Anggota BRICS tersebut yang menyelamatkan struktur keuangan IMF dan memulihkan kekuasaannya bahkan legitimasinya, dengan menyuntikkan sejumlah dana besar ke dalam cadangannya. Perubahan geopolitik dan persaingan hegemoni tersebut dapat diartikan sebagai langkah awal dari sebuah pemerintahan unipolaritas menuju sistem multipolaritas.

Pada tahun 2011 pertemuan tingkat tinggi BRIC yang kedua, Afrika Selatan bergabung dalam kelompok ini yang mengubah akronim BRIC menjadi BRICS. BRICS memiliki kekuatan dari sisi jumlah penduduk yaitu 40% dari populasi dunia, dan PDB mereka adalah seperlima dari total PDB dunia. Antara pada tahun

2003 dan 2007 pertumbuhan 4 negara itu menyumbang 65% PDB dunia. Dalam hal paritas daya beli, PDB hari ini sudah melebihi dari Amerika Serikat atau Uni Eropa. Untuk memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan di negara-negara tersebut, pada tahun 2003 BRIC menyumbang 9% dari PDB agregat dunia, dan pada tahun 2009 angka ini meningkat menjadi 14%. Pada tahun 2010, PDB jumlah dari semua lima negara (termasuk Afrika Selatan) sebesar US\$ 11 triliun atau 18% dari ekonomi dunia (Forum BRICS, 2010). Bahkan *World Bank* pun menyatakan, dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia bergantung pada BRICS yang memiliki 27% kekuatan daya beli dunia. Selain itu 45% tenaga kerja global berada di negara-negara BRICS. Mereka juga memiliki cadangan mata uang asing sebesar 4,4 Trilyun Dollar (Sulaeman, 2013).

Krisis finansial di Amerika Serikat yang telah menurunkan perannya di perekonomian global menjadi momen penting bagi negara-negara BRICS. Pada bulan Maret 2013 lalu, pemimpin kelima negara itu berkumpul di Durban, Afrika Selatan dan menyepakati dibentuknya lembaga keuangan sejenis IMF pembentukan tersebut bukan tanpa alasan, ada alasan politis kuat yang mendasarinya. Pasalnya, selama ini IMF mengenal sistem pemungutan suara (*One Dollar, One Vote*) dalam menentukan sebuah kebijakan. Setiap negara anggota memiliki kuota yang tercermin dari ukuran negara tersebut dalam ekonomi global diukur berdasarkan GDP. Meski GDP masing-masing negara telah banyak berubah, namun kuota yang dimiliki tiap negara anggota tidak berubah (Anindito, 2014).

Hal ini penting untuk memahami peran BRICS yang berkeinginan transisi ke dunia multipolar. BRICS dipandang dapat memecahkan *status quo* dengan melakukan gerakan perlawanan terhadap model hegemonik saat ini dan merumuskan pendekatan baru untuk model pembangunan di negara-negara berkembang. Inilah yang menimbulkan pentingnya gerakan sosial di negara-negara BRICS untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan kemudian di tahun 2014 kelompok ini menandatangani dokumen-dokumen atas berdirinya BRICS Bank yang terdiri dari *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement*, hal tersebut dipandang sebagai langkah pertama untuk memecahkan

hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global, termasuk lembaga buaatannya IMF dan *World Bank*.

Langkah ini juga pernah dilakukan sebelumnya, pada akhir 1960-an negara-negara *Andean* menciptakan *Corporación Andina de Fomento* (CAF), yang juga dikenal "*America Latin Development Bank*" sebagai cara untuk tidak menerapkan aturan ketat yang diberlakukan oleh *World Bank* pada kredit infrastruktur. CAF saat ini telah mendanai infrastruktur di Amerika Latin lebih besar dibandingkan dengan *World Bank* dan *Inter-American Development Bank*. Di awal tahun 2000-an, sebagai reaksi terhadap kegagalan IMF yang berdampak luas untuk menghentikan spekulasi mata uang selama krisis Asia, 10 negara ASEAN plus China, Korea Selatan dan Jepang membentuk jaringan perjanjian *swap* mata uang bilateral yang disebut dengan *Chiang Mai Initiative*. Kemudian, di tahun 2009 tujuh negara Amerika Latin menandatangani kesepakatan untuk mendirikan "*South Bank*" atau *BancoSur* untuk mendanai pembangunan daerah dan perlindungan sosial (Desai dan Vreeland, 2014). Tetapi bank-bank tersebut berbeda dengan *BRICS Bank* yang memungkinkan lebih besar pengaruhnya karena memiliki fitur yang menarik negara-negara berkembang untuk bergabung dengan norma-norma ataupun gagasan-gagasan yang dimilikinya dan *BRICS* sendiri merupakan potensi ekonomi terbesar saat ini serta telah memainkan peran penting di panggung internasional paska krisis global yang melanda Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai jantung kapitalisme dunia.

I.2 Rumusan Permasalahan

Dalam kondisi perekonomian global yang didominasi oleh Amerika Serikat saat ini sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang untuk berkiprah dalam perekonomian global. Ide *BRICS* muncul atas kekecawaan tidak berjalannya reformasi lembaga keuangan internasional (IMF dan *World Bank*) karena kedua lembaga tersebut seringkali di asumsikan sebagai alat pencapaian hegemoni Amerika Serikat di perekonomian global. Dengan cara mengurangi peran mata uang dolar Amerika Serikat dalam kegiatan ekonomi atau transaksi perdagangan internasional diharapkan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan lembaga keuangan ciptaannya serta menggeser sistem internasional unipolaritas yang dipimpin oleh Amerika Serikat menjadi multipolaritas dimana

negara-negara berkembang dapat berperan aktif dan menentukan nasib perekonomiannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut, bagaimana BRICS menghadapi hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global melalui lembaga keuangan internasional periode 2013-2014?

Tahun 2013 merupakan tahun munculnya ide atau gagasan negara-negara BRICS untuk membentuk sebuah lembaga keuangan baru sejenis IMF dan *World Bank* agar tidak selalu ketergantungan oleh Amerika Serikat dan pada tahun 2014 negara-negara BRICS telah merealisasikan ide atau gagasan tersebut dengan membentuk sebuah bank baru yang bernama BRICS Bank yang terdiri dari *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement*.

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Menganalisis terbentuknya BRICS dan BRICS Bank (*New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement*)
- b) Menjelaskan hegemoni Amerika Serikat khususnya yang terkait dengan lembaga keuangan internasional (IMF dan *World Bank*)
- c) Memberikan gambaran mengenai upaya BRICS dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global periode 2013-2014.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- a) Secara praktis dapat mengetahui lembaga keuangan internasional sebagai alat hegemoni Amerika Serikat dan alasan didirikannya BRICS dan BRICS Bank sebagai upaya menghadapi hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global.
- b) Secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya konsentrasi Ekonomi Politik Internasional, agar mampu meningkatkan kemampuan analisis terhadap isu-isu internasional kontemporer di bidang

ekonomi politik secara lebih mendalam. Manfaat lainnya bagi mahasiswa tersebut maupun bagi penulis ialah mampu memahami upaya BRICS untuk menghadapi dominasi Amerika Serikat yang semakin tak terkontrol dan merugikan negara-negara berkembang yang di “batasi” perannya dalam arena Internasional serta mendirikan BRICS Bank sebagai bentuk tantangan terhadap IMF dan *World Bank*.

I.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat banyak literatur yang membahas mengenai hegemoni Amerika Serikat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BRICS untuk menghadapi hegemoni Amerika Serikat tersebut salah satu upayanya ialah membuat BRICS *Bank* berikut beberapa sumber bahan bacaan yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini.

I.5.1 Hegemony Amerika Serikat

Dalam jurnal yang berjudul “**The United States and the International Financial Institutions: Power And Influence Within the World Bank and the IMF, Ngaire Woods**” menerangkan bahwa Amerika Serikat memainkan peran dominan dalam lembaga keuangan internasional yaitu *International Monetary Fund* dan *World Bank*. Dominasi Amerika Serikat terlihat kepada seperangkat aturan yang melayani kepentingan AS, salah satu contohnya ialah aturan IMF dalam penyesuaian mata uang dollar sebagai alat ukur mata uang internasional. Isu yang dibahas dalam jurnal ini adalah menganalisis bagaimana Amerika Serikat dapat berpengaruh di IMF dan *World Bank* yang terletak pada kekuatan struktur formal dan informal di lembaga tersebut, seperti pada kontribusi pendanaan sehingga menguatkan hak suara Amerika Serikat pada setiap pengambilan keputusan di IMF dan *World Bank*. Amerika Serikat memiliki 17,33 persen suara di Dewan Eksekutif. Meskipun hal tersebut bukan suara mayoritas, tetapi memberikan kekuasaan Amerika Serikat untuk memveto perubahan kebijakan (Woods, 2003, hlm. 6)

Amerika Serikat juga mempengaruhi keputusan pinjaman kredit IMF dan *World Bank*. Hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Strom Thacker yang

pertama berasumsi bahwa Amerika Serikat memainkan peran utama dalam lembaga keuangan internasional tersebut, IMF dan World Bank meminjamkan pinjaman kepada negara-negara yang memiliki kedekatan politis dengan Amerika Serikat. Kedua, pinjaman IMF dan World Bank merupakan sebuah “*carrot*” yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara yang menerima kepentingannya dan “*stick*” bagi yang menolak kepentingannya. Sebagai contoh pinjaman IMF ke Hungaria, Yugoslavia, dan Rumania sebagai bentuk strategi Amerika Serikat di masa perang dingin untuk melawan Uni Soviet yang berideologi Komunis.

Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar dalam lembaga keuangan internasional, terutama dalam pembuatan kebijakan dan modus operandinya. Kesempatan tersebut diraih ketika lembaga tersebut membutuhkan suntikan dana untuk membuat *International Development Association*, sehingga menjadikan hak suara Amerika Serikat semakin besar.

Kemudian, di dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “**Dollar Amerika Serikat Sebagai Alat Hegemoni (1944-2000): Tinjauan Filosofis Tentang Ekonomi Politik Global, Krisna Budiman**” menjelaskan dolar sebagai elemen hegemoni yang mengantarkan Amerika Serikat menjadi negara hegemon dalam kancah ekonomi politik global. Penelitian ini juga menjelaskan tentang berkembangnya fungsi mata uang yang melampaui fungsinya. Dolar bukan lagi sekedar alat tukar, melainkan menjadi sebuah alat dan symbol bagi proses hegemoni Amerika Serikat. Dolar menjadi alat hegemoni karena persetujuan yang diberikan negara-negara lain kepada Amerika Serikat atas penetapan dolar sebagai mata uang hegemon dalam kesepakatan Bretton Woods 1944 (Budiman, 2010).

Penelitian ini mendeskripsikan hegemoni dengan pendekatan pemikiran Gramsci sebagai alat pembedahnya, kemudian menjelaskan perjalanan Amerika Serikat sehingga menjadi hegemon, lanjut kepada penjelasan mengenai dolar sebagai ekspresi hegemonik mulai dari perjalanan dolar dari masa ke masa hingga pengaruhnya terhadap ekonomi politik global. Penelitian ini diakhiri dengan analisis kemunculan Euro sebagai counter hegemoni, kemunduran dolar dan berakhirnya hegemoni Amerika Serikat.

Dolar adalah mata uang yang paling populer diseluruh dunia hingga kini. Dengan posisinya seperti itu, maka bukan sesuatu yang mengejutkan jika mata

uang tersebut membantu Amerika Serikat untuk turut menghegemon dunia. Dolar menjadi hegemoni karena persetujuan terhadap Amerika Serikat melalui system kapitalisme yang dibangun berdasarkan kekuatannya sebagai negara super power. Kemunculan Euro perlahan mulai menggeser posisi Dolar dalam transaksi dunia. Namun, selama Dolar masih terikat dengan komoditas minyak dan tetap menjadi alat utama perdagangan internasional, maka posisi Dolar sebagai mata uang hegemon takkan berubah. Dan fungsi Dolar sebagai alat hegemoni masih melekat, maka hegemoni Amerika Serikat terhadap dunia, terutama negara ketiga, akan tetap berlangsung sampai batas waktu yang tak bias ditentukan.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai hegemoni Amerika Serikat sejak era Bretton Woods tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis ialah instrument/alat hegemoni yang digunakan oleh Amerika Serikat dan subjek dari counter hegemoni. Bila penelitian ini alat hegemoninya menggunakan Dolar sedangkan di penelitian penulis adalah lembaga keuangan internasional (IMF dan *World Bank*) dan subjek dari counter hegemoni penelitian ini Euro sedangkan di penelitian penulis ialah BRICS Bank.

I.5.2 BRICS

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “**Analisis Kepentingan Cina Mewujudkan *Soft Balancing* Terhadap Amerika Serikat Melalui BRICS, Muhammad Ghufroon Mustaqim**” menjelaskan bahwa fenomena BRICS menarik apabila dikaitkan dengan Cina sebagai *emerging power* yang menginginkan agar hegemoni AS sebagai *superpower* saat ini tidak semakin dominan. Berkaitan dengan politik luar negeri Cina, melalui BRICS, ingin menyatukan kekuatan kolektif negara-negara anggota untuk menaikkan profil dan pengaruh mereka di dunia internasional, lebih mendemokratisasikan tatanan dunia, dan menahan perluasan pengaruh hegemoni AS. Semakin besarnya pengaruh Cina dalam percaturan politik internasional tidak terlepas dari prestasi ekonomi, kekuatan militer yang semakin solid, dan promosi kebudayaan Cina yang semakin intensif. Didalam perspektif neorealisme mengatakan bahwa tingkah laku suatu negara ditentukan terutama oleh posisinya dalam distribusi kekuasaan dalam struktur internasional. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa

Cina ingin mewujudkan perimbangan kekuatan. Dalam melaksanakan strategi perimbangan kekuatan ini, Cina (dan beberapa *great powers lain*) tidak menggunakan cara-cara tradisional, yakni dengan kekuatan militer seperti perimbangan yang pernah dilakukan banyak *great powers lain* dalam sejarah. AS memiliki alat-alat lain untuk menguatkan hegemoninya, yaitu melalui perdagangan internasional dan kepemilikan teknologi militer yang sangat canggih sehingga ia tidak merasa perlu untuk menguasai wilayah negara lain. Berkat ketiadaan ancaman kedulatan teritori ini, Cina (dan para *great powers lain*) memilih strategi *soft balancing*, yakni dengan cara-cara diplomatis dan non-militer, untuk menahan hegemoni AS.

BRICS memiliki motivasi untuk memperbesar pengaruh mereka dalam menentukan agenda-agenda internasional dan menahan hegemoni AS. Melalui BRICS, negara-negara anggotanya melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kebebasan AS dalam menentukan dan mengatur agenda-agenda global. Apa yang dilakukan oleh BRICS dalam menahan hegemoni AS dapat dikategorikan sebagai upaya *soft balancing*. Kehadiran BRICS dalam sistem internasional saat ini, selain berfungsi sebagai *platform* kerja sama ekonomi negara-negara anggota, juga dapat dipahami sebagai kerja sama upaya *soft balancing* negara-negara anggota terhadap hegemoni AS.

Negara-negara anggota BRICS adalah para *great powers* yang mewakili berbagai kawasan di dunia. Cina juga melihat bahwa mereka sama-sama memiliki kepentingan untuk menahan hegemoni AS, walaupun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Mempertimbangkan hal ini, Cina melihat terdapatnya koherensi antara strategi *soft balancing* Cina terhadap AS dengan karakteristik BRICS. Cina ingin upaya *soft balancing*-nya semakin berhasil dengan keanggotaan dan keaktifannya di BRICS. Cina kemudian menjadikan BRICS sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya sebagai kerja sama multilateral yang ingin semakin diperkuat. Peraihan tujuan-tujuan politik luar negeri Cina melalui BRICS semakin meningkatkan kekuatan relatif Cina dalam distribusi kekuasaan internasional yang kemudian berimplikasi pada penurunan kekuatan relatif AS.

Didalam penelitian ini BRICS dalam beberapa hal memberikan makna yang strategis bagi *soft balancing* Cina. Dalam strategi teritorial denial kontribusi

BRICS memang tidak signifikan bagi Cina. Tetapi dalam aspek *entangling diplomacy, signals of resolve to balance*, dan terutama *economic strengthening* BRICS sangat relevan dan membantu strategi *soft balancing* Cina.

I.5.3 BRICS Bank

Dalam jurnal **“The Bretton-Woods Institutions and the BRICS Bank: an institutionalist explanation for the creation of a new financial institution, Feliciano de SáGuimarães”** membahas bagaimana kurang berjalannya reformasi kuota IMF dan Bank Dunia telah membuat negara-negara berkembang tidak puas, seperti negara-negara yang tergabung dalam forum kerjasama BRICS, mereka merancang lembaga keuangan baru yaitu *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA). Lembaga baru ini meniru tanggung jawab baik IMF dan Bank Dunia, tetapi dengan distribusi daya yang lebih sama (kuota saham) di antara anggota baru. Secara teoritis, dalam jurnal ini merancang sebuah model yang menjelaskan alasan di balik pembuatan *BRICS Bank* (SáGuimarães, n.d, hlm.1)

Jurnal ini memberikan penjelasan institusionalis berdasarkan keputusan strategis yang menggunakan perubahan kelembagaan dan pembuatan teori institusional karena menurut penulis dalam jurnal ini studi mengenai organisasi internasional merupakan area penelitian yang penting dalam bidang hubungan internasional. Hipotesis dalam jurnal ini adalah bahwa IMF dan Bank Dunia memiliki masalah didalam kelembagaannya dan BRICS memiliki peluang untuk membuat lembaga baru. Jurnal ini dibagi dalam tiga bagian. Pertama, mengembangkan argumen teoritis untuk penciptaan *BRICS Bank*. Kedua, membahas guncangan endogen yaitu lembaga *Bretton Woods*. Ketiga, mengenai rantai peristiwa yang mengarah pada penciptaan kedua CRA dan NDB.

Di dalam jurnal ini memiliki 3 prediksi yaitu; pertama, jika lembaga yang baru kuat untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dalam lembaga *status quo* yang lama, negara yang tidak puas akan mencoba mereformasi lembaga yang lama. Kedua, jika reformasi kelembagaan tidak tercapai karena adanya kekuasaan yang dominan dalam mengontrol proses pengambilan keputusan, negara yang tidak puas akan mencari alternatif kelembagaan. Ketiga, jika lembaga-lembaga baru yang dibuat oleh kekuatan baru akan memberi kekuatan ekstra kepada

negara-negara yang tidak puas dalam lembaga-lembaga yang terdahulu untuk mendorong sebuah reformasi.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Hegemoni

Di dalam perspektif Antonio Gramsci menyatakan bahwa ada dua jenis kontrol politik untuk mencapai kepentingan suatu kelompok yaitu dominasi yang berdasarkan pada pemaksaan (*coercion*) dan kepemimpinan intelektual dan moral atau yang sering disebut sebagai hegemoni yang didasarkan pada persetujuan (*consent*). Hegemoni menurut Antonio Gramsci adalah melalui kepemimpinan intelektual dan moral, proses hegemoni dicapai oleh sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dibanding melalui penindasan, seperti misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat (Patria dan Arief, 2003, hlm. 119). Kondisi hegemonik ketika kondisi dimana hubungan antar kelas, antar negara, dan *civil society* dicirikan oleh persetujuan dengan alih-alih paksaan.

Hegemoni digunakan oleh Gramsci untuk menggambarkan hubungan persetujuan dengan cara kepemimpinan politik dan ideologis dibandingkan dengan hubungan dengan paksaan. Hegemoni ini beroperasi dalam masyarakat di kedua struktur ekonomi dan tingkat superstruktural masyarakat sipil dan masyarakat politik. Oleh karena itu, hegemoni diatur melalui kepemimpinan, aliansi dan jaringan dalam konteks perjuangan ideologi dan politik (Engel, 2010, hlm. 8). Selain itu, menurut Stephen Gill hegemoni mengacu pada proses politik yang didasarkan pada seperangkat hubungan relatif, di mana persetujuan lebih diunggulkan daripada paksaan/dominasi. Persetujuan ini dicapai melalui kombinasi legitimasi ideologi, kompromi sosial dan konsesi material (Gill, 2003).

Pemikiran Gramsci ini kemudian dikembangkan oleh Robert W. Cox sebagai Neo-Gramscian yang menyetujui pemberian atribut "persetujuan" (*consent*) pada dominasi tersebut. Bagi Robert W. Cox, hegemoni terwujud dalam bentuk persetujuan (*consensus*) yang bersifat meluas yang didasarkan pada penerimaan ide dan ditopang oleh sumber daya material dan institusi (Andreas dan Morton, 2004). Lebih lanjut, Robert Cox, seorang penteor Hubungan Internasional memakai konsep hegemoni sebagai cara menjelaskan kontrol

hegemoni dalam masyarakat-masyarakat kapitalis untuk menerangkan cara bagaimana ide-ide dominan mengenai tatanan dunia membantu mempertahankan pola-pola khusus dari hubungan-hubungan antara kekuatan materi, ide-ide dan institusi-institusi pada suatu level global (Mahyudin dan Makmur, n.d, hlm. 159). Robert Cox mengidentifikasi interaksi jangka panjang antara *coercion* dan *consent* dalam konteks hubungan kekuasaan antar negara, dan mengatakan bahwa penggunaan *consent* lebih dominan dibanding *coercion* dalam kondisi hegemoni.

Robert Cox (1993, hlm. 58) menjelaskan hegemoni dapat dikatakan eksis sebagai berikut:

When the dominant state and social forces sustain their position through adherence to universalised principles which are accepted or acquiesced in by a sufficient proportion of subordinate states and social forces

Hal ini dikarenakan dalam kondisi hegemoni, sang (negara) hegemon mengidentikkan kepentingannya yang tampak seolah-olah merupakan kepentingan umum sehingga sang hegemon mampu meraih persetujuan dari negara-negara tersebut untuk memperoleh kepentingannya yang lebih besar, yakni menjadi pemimpin.

Jika, berbicara tentang hegemoni berarti tentang sistem antarnegara. Hegemoni tidak ada dengan sendirinya, tetapi merupakan fenomena politik yang unik didalam sistem antarnegara yang dibentuk, hasil dari sejarah dan keadaan politik tertentu (Martin dan Terry, 2002, hlm. 137). Negara hegemon memiliki kekuatan struktural yang memungkinkan untuk menempati posisi penting untuk memainkan peran didalam suatu sistem. Untuk mencapai suatu kekuatan structural tersebut negara hegemon paling tidak memiliki kekuatan sumber daya (alam dan manusia) yang membentuk preferensi negara-negara lain (Ibid, hlm. 139). Hegemoni tidak hanya didukung oleh kekuatan material, tetapi dapat ditopang oleh budaya transnasional hegemonik yang melegitimasi aturan dan norma-norma sistem hirarkis antarnegara.

Perkembangan mengenai pemikiran Gramsci tentang hegemoni oleh Cox yang mengarah pada konteks nasional ke internasional, membawa penulis untuk mencoba menggabungkan teori Gramsci dan Neo-Gramscian Robert Cox sebagai teoritis yang konsen dalam membahas teori hegemoni dan *counter hegemony* untuk menganalisis dinamika hubungan internasional. *Counter hegemony*

merupakan proses dimana kelompok non-hegemonik mulai melakukan perlawanan yang nyata terhadap kelompok hegemonik.

Relevansi teori dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis hegemoni Amerika Serikat di dalam perekonomian global melalui lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan *World Bank* pasca perang dunia II tepatnya sejak sistem Bretton Woods dibentuk. Kemudian, munculnya BRICS dianggap sebagai negara-negara yang mencoba meng-*counter* hegemoni Amerika Serikat di dalam perekonomian global dengan membentuk lembaga keuangan serupa dengan IMF dan *World Bank* yang dikenal dengan BRICS Bank (*BRICS Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement*). Cara inilah yang ditawarkan oleh Gramsci untuk melancarkan *counter* terhadap hegemoni yang disebut dengan *War of Position*. Karena menurut Gramsci mekanisme hegemoni dunia bisa melalui lembaga internasional.

I.6.2 Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pada setiap tindakan negara didasarkan pada *meanings* yang muncul dari hasil interaksinya dengan lingkungan Internasional. Konstruktivisme beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara akan berpengaruh terhadap bentuk sistem internasional. Salah satu konsep terpenting konstruktivisme adalah identitas. Identitas dimaknai sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan” (Wendt, 1999, hlm. 224). Identitas menjadi dasar pemaknaan aktor terhadap lingkungan sekitarnya. Tindakan aktor menjadi bermakna karena dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman diri aktor terhadap dirinya sendiri dan situasi internasional. Konstruktivisme melihat hubungan internasional sebagai dunia sosial yang dipengaruhi oleh konstruksi dan rekonstruksi aktor-aktor yang melibatkan gagasan, identitas, budaya, keyakinan, nilai dan norma, serta dimensi-dimensi non-material. Premis dasar konstruktivisme adalah bahwa gagasan lebih penting daripada materi; gagasan inilah yang membentuk identitas serta kepentingan actor (Ibid, hlm. 228). Dalam kasus ini identitas menjadi penting untuk dibahas sebab konstruktivis melihat bahwa terdapat adanya pengaruh pemahaman identitas terhadap perilaku kolektif aktor internasional baik negara maupun masyarakat. Fenomena ini digambarkan oleh Alexander Went melalui konsep identitas

kolektif yang mengatakan bahwa interaksi dari negara-negara di ranah internasional menciptakan adanya nilai yang kemudian membentuk identitas bersama (Wend, 1992, hlm 384).

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat fenomena persatuan dari actor-aktor internasional yang dibentuk melalui adanya kesamaan identitas. Kesamaan dalam merefleksikan diri, nilai yang dimiliki, dan pentingnya persatuan (negara-negara dalam organisasi atau forum internasional) terhadap nilai atau norma yang dimiliki demi menciptakan perubahan yang lebih baik.

Relevansi antara teori dengan penelitian ini untuk menganalisis terbentuknya BRICS dan BRICS Bank yang berdasarkan ide atau gagasan bersama untuk merekonstruksi tatanan perekonomian dunia yang terlalu di dominasi oleh Amerika Serikat. Tindakan tersebut berlandaskan atas identitas yang melekat sebagai *new emerging countries* kesamaan terhadap cita-cita dalam mereformasi lembaga keuangan internasional (IMF dan *World Bank*) yang bertujuan agar negara-negara berkembang dapat berperan di dalam perekonomian global. Krisis global juga menjadi sebuah momentum untuk membentuk forum kerjasama ekonomi ini atas dasar pemahaman dan kesadaran bersama.

I.7 Alur pemikiran

**Hegemoni Amerika Serikat di Perekonomian Global
Melalui Lembaga Keuangan Internasional
(IMF dan World Bank)**

**Munculnya BRICS dianggap sebagai aktor yang
menghadapi hegemoni Amerika Serikat**

**BRICS Bank sebagai upaya BRICS dalam menghadapi
hegemoni Amerika Serikat**

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam tulisan ini, penelitian menggunakan metode penelitian dekskriptif. Metode ini dilakukan dengan menggambarkan kedudukan BRICS dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global. Dimulai dari penggambaran kelebihan/potensi BRICS sebagai penyeimbang dominasi Amerika Serikat sampai gambaran mengenai upaya penyeimbangan yang akan dilakukan oleh BRICS.

1.8.2 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini. Pertama, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pernyataan-pernyataan pemerintah. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian dan memberi tambahan informasi untuk pembahasan. Data sekunder ini yaitu berupa buku, jurnal, artikel dari surat kabar dan majalah, serta sumber *website*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai sumber dan referensi penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (*Library Research*). Telaah pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Sumber-sumber yang merupakan data sekunder tersebut, didapatkan dari beberapa perpustakaan dan dari institusi terkait.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam sebuah analisis kualitatif setiap kenyataan sosial dianggap

sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain sehingga penelitian ini berfungsi untuk mencari fakta agar kita dapat memahami fenomena tersebut. Dengan teknik ini, analisis ditekankan pada data kualitatif yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis. Namun untuk data pelengkap, juga disertakan data kuantitatif berupa angka-angka statistik yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.

I.9 Sistematika Pembabakan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang topik yang dibahas dalam penelitian, yaitu mengenai BRICS dan kondisi perekonomian global yang di hegemoni oleh Amerika Serikat. Selain itu, di dalam Bab ini juga berisi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DALAM PEREKONOMIAN GLOBAL

Bab ini menjelaskan hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global melalui atau lembaga-lembaga keuangan seperti *International Monetary Fund* (IMF)

BAB III BRICS BANK SEBAGAI UPAYA BRICS DALAM MENGHADAPI HEGEMONI AMERIKA SERIKAT

Bab ini menjelaskan gambaran umum BRICS dan pembentukan BRICS Bank (*New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement*) sebagai upaya BRICS untuk menghadapi hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran bagi penulis.